



Katalog BPS : 6104006.94

***PROFIL
INDUSTRI MIKRO DAN KECIL
PROVINSI PAPUA
Triwulan I - 2012***



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA



Katalog BPS : 6104006.94

PROFIL
INDUSTRI MIKRO DAN KECIL
PROVINSI PAPUA
Triwulan I - 2012



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Triwulan I - 2012

Nomor Katalog / Catalog Number : 6104006.94

Nomor Publikasi / Publication Number : 9400.1313

Ukuran Buku / Book Size : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman / Page Number : iii + 37 Halaman / Page

Naskah / Editor :

Bidang Statistik Produksi

BPS Provinsi Papua

Statistics Production Division

BPS-Statistics of Papua Province

Gambar Kulit / Art Designer :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

BPS Provinsi Papua

Integration Processing and Diseminasi Statistics Division

BPS-Statistics of Papua Province

Diterbitkan Oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua

BPS-Statistics of Papua Province

2013

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Triwulan I Tahun 2012 Provinsi Papua ini merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulan I Tahun 2012 (VIMK12). Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2012 dengan metode sampel. Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, data yang disajikan meliputi antara lain banyaknya perusahaan, persentase tenaga kerja, persentase balas jasa pekerja, persentase pengeluaran dan pendapatan, serta persentase kendala dan prospek usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk dunia usaha serta bagi para pengguna data yang memerlukannya. Disamping itu data dalam publikasi ini dapat digunakan pula sebagai referensi untuk berbagai penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan Industri Mikro dan Kecil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah merampungkan publikasi ini.

Jayapura, Agustus 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua


Ir. Didik Koesbianto, M.Si
NIP 19650809 198702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v - viii
PENJELASAN UMUM	1 – 19
ANALISIS DESKRIPTIF	
A. PERUSAHAAN/USAHA	20
B. TENAGA KERJA	22
C. BALAS JASA PEKERJA	24
D. PENGELUARAN	24
E. PENDAPATAN	25
F. KENDALA USAHA	26
G. MODAL	28
H. PERBANKAN	29
I. KOPERASI	30
J. NON-KOPERASI	31
K. PEMASARAN	32
L. KEMITRAAN	33
M. BIMBINGAN USAHA	34
N. PROSPEK USAHA	35

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel 1	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2012	21
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Papua dan Indonesia Menurut Jenis Industri Mikro/Kecil Triwulan I Tahun 2012	21
Gambar 2	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Triwulan I Tahun 2012.....	21
Gambar 3	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin	22
Gambar 4	Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Tenaga Kerja dan Jenis Kelamin	22
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Triwulan I Tahun 2012	23
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Umur Pengusaha Triwulan I Tahun 2012	23

Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan (000 Rp) Triwulan I Tahun 2012	24
Gambar 8	Persentase Pengeluaran Usaha di Beberapa Wilayah Indonesia Timur terhadap Pengeluaran Usaha di Indonesia Triwulan I Tahun 2012	25
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan per Triwulan (Jutaan Rp) Triwulan I Tahun 2012	26
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Utama Triwulan I Tahun 2012	27
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku Triwulan I Tahun 2012	27
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Sumber Modal Triwulan I Tahun 2012	28
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Asal Pinjaman Utama Triwulan I Tahun 2012	29
Gambar 14	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Triwulan I Tahun 2012	29
Gambar 15	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi Triwulan I Tahun 2012	30

Gambar 16	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Pelayanan Koperasi yang Diterima Triwulan I Tahun 2012.....	30
Gambar 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Bantuan Non-Koperasi yang Diterima Triwulan I Tahun 2012	31
Gambar 18	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Perusahaan Triwulan I Tahun 2012	32
Gambar 19	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain Menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Triwulan I Tahun 2012	33
Gambar 20	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya Pernah Mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Jenis Bimbingan Usaha Triwulan I Tahun 2012	34
Gambar 21	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya pernah mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Penyelenggara Bimbingan Usaha Triwulan I Tahun 2012	34
Gambar 22	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keadaan Usaha Triwulan I Tahun 2012 Dibanding Triwulan Sebelumnya	35

Gambar 23	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Rencana Mengembangkan/ Memperluas Usaha pada Triwulan Selanjutnya Tahun 2012	36
Gambar 24	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Ada Rencana Mengembangkan/ Memperluas Usaha pada Triwulan Selanjutnya Tahun 2012	37

<http://papua.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun, namun guna menyuplai data IMK untuk penghitungan produk domestik regional bruto (PDRB), maka mulai tahun 2011 pengumpulan data IMK dilakukan secara triwulanan. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui SE tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui SE tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2012 (VIMK12) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK12 Sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK12 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK12 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK12 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut 2 digit KBLI, seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Permodalan
- f. Kendala dan prospek usaha
- g. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK12 ini dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota di daerah potensi di Provinsi Papua dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 43 blok sensus dan mencakup 170 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2012 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. **VIMK12-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK12-L (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK12-DS (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK12-S (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. **VIMK12-RB (Rekap Blok sensus)**, digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel blok sensus yang digunakan pada kegiatan VIMK12 adalah Daftar Blok Sensus terpilih pada Survei Industri Mikro dan Kecil 2010 (VIMK10-DSBS). Dengan demikian, sampel blok sensus terpilih VIMK12 adalah merupakan subsampel dari blok sensus VIMK10.

DSBS-VIMK10 adalah daftar blok sensus terpilih pada Survei Industri Mikro dan Kecil 2010 yang dilengkapi dengan muatan jumlah usaha industri mikro dan kecil hasil pengolahan Daftar VIMK10-L. Walaupun pada saat pelaksanaan VIMK10 blok sensusnya sudah distratakan, namun untuk proses *updating*, sebelum digunakan perlu dilakukan proses re-stratifikasi lagi berdasarkan data hasil listing dan survei sampel VIMK10.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Re-stratifikasi ditujukan untuk mengelompokkan unit-unit area (blok sensus) menurut komposisi jumlah relatif usaha IMK menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Mengingat jumlah alokasi sampel blok sensus per-Provinsi relatif tidak banyak maka, stratifikasi dilakukan pada level Provinsi.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

Tahap pertama: adalah memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara PPS (*Probability Proportional to Size*) dengan *size* banyaknya IMK hasil listing VIMK10. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus hasil re-stratifikasi dalam satu provinsi.

Tahap kedua: mengambil seluruh industri kecil (kecuali jika ada Provinsi dengan jumlah Industri Kecilnya melebihi jumlah target sampel maka dilakukan pemilihan sampel) dan memilih sejumlah industri mikro dari hasil *listing* secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih.

4. Penyajian

Informasi mengenai profil industri mikro dan kecil tahun 2012 Provinsi Papua hanya dapat disajikan dalam bentuk persentase saja, karena BPS Provinsi Papua tidak mengestimasi populasi. Estimasi populasi hanya dilakukan di BPS-RI.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK12, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK12 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel : Koordinator Statistik Kecamatan (PCS) (KSK)/Staf BPS
- b. Petugas Pemeriksa (PMS) : Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di : KSK (aparatus BPS pada tingkat Kecamatan kecamatan)
- d. Koordinator pelaksanaan di : Kepala BPS Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota
- e. Koordinator pelaksanaan di : Kepala BPS Provinsi tingkat Provinsi

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK12.

a. Industri Manufaktur: Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).

b. Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur: Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

c. Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur: Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *makloon*).

d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2009 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. Produksi Utama

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa** industri terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

f. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

- 1) **Tidak tamat SD:** Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
- 2) **SD & sederajat:** Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.
- 3) **SLTP & sederajat:** Mereka yang tamat SMP, MULU, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kependidikan Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.
- 4) **SLTA & sederajat:** Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah,

Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.

- 5) **DI/DII:** Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
- 6) **Sarjana Muda/DIII:** Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih:** Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

g. Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru.

Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

h. Tenaga Kerja

- 1) Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja**.
- 3) Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
- 4) Tenaga kerja lainnya:** Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

- i. **Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji:** Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
 - 2) **Upah lembur:** Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
 - 3) **Hadiah:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
 - 4) **Bonus:** Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
 - 5) **Tunjangan:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- j. **Biaya Umum:** Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:

- 1) **Bahan Baku:** Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
- 2) **Bahan Penolong:** Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
- 3) **Bahan Bakar:** Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
- 4) **Pelumas:** Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.

5) **Pemakaian Listrik**

Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.

6) **Pemakaian Air**

Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.

7) Pemakaian gas kota

Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.

8) Alat tulis dan keperluan kantor: Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.

9) Bunga atas pinjaman: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2011, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

10) Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi: Seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.

11) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal: Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

12) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa.

Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) Sewa tanah untuk usaha: Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) Pajak tak langsung: Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya: Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) Pendapatan dari kegiatan Lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

I. Harta yang dimiliki

- 1) Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d. Kendaraan
 - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

m. Sumber modal: Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
- 2) Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK12 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a) Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b) Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c) Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d) Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e) Keluarga/famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f) Lainnya:** Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

n. Kendala dan Prospek Usaha

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2011, prospek usaha pada tahun yang akan datang, dan juga mencakup mengenai keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

1. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan:

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

2. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

3. Bimbingan/ pelatihan/ penyuluhan keterampilan/ teknik produksi: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.

4. Bimbingan/penyuluhan pemasaran: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

5. Kemitraan: Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2012 ini, tidak seperti publikasi-publikasi tahun sebelumnya yang menggunakan data selama satu tahun, Data yang disajikan hanya selama triwulan I tahun 2012. Data menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Industri Makanan | KBLI : 10 |
| 2. Industri Minuman | KBLI : 11 |
| 3. Industri Tekstil | KBLI : 13 |
| 4. Industri Pakaian Jadi | KBLI : 14 |
| 5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | KBLI : 15 |
| 6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya. | KBLI : 16 |
| 7. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | KBLI : 18 |
| 8. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional | KBLI : 21 |
| 9. Industri Barang Galian Bukan Logam | KBLI : 23 |
| 10. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | KBLI : 25 |
| 11. Industri Alat Angkut Lainnya | KBLI : 30 |
| 12. Industri Furnitur | KBLI : 31 |
| 13. Industri Pengolahan Lainnya | KBLI : 32 |
| 14. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | KBLI : 33 |

ANALISIS DESKRIPTIF

INDUSTRI MANUFAKTUR MIKRO DAN KECIL

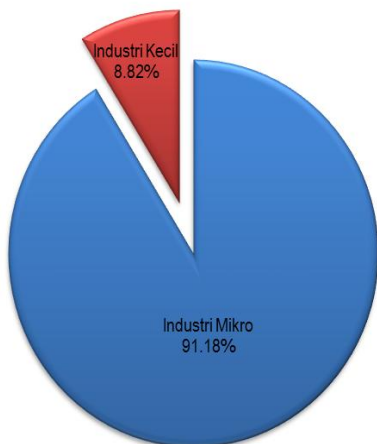
Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi Papua. Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan Papua yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu komponen dari sektor industri manufaktur yang meskipun mempunyai sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap pembentukan ekonomi Papua, tetapi ikut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di Papua. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. PERUSAHAAN/USAHA

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulan I Tahun 2012 (VIMK12) di Provinsi Papua tercatat bahwa perusahaan/usaha IMK sebanyak 3.414 usaha (Tabel 1). Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari kelompok tenaga kerja yang terbanyak, yaitu kelompok tenaga kerja 2 – 4 orang sebanyak 2.208 usaha (64,67 persen), kelompok tenaga kerja 1 orang sebanyak 905 usaha (26,51 persen), kelompok tenaga kerja 5 – 9 orang sebanyak 269 usaha (7,88 persen), kelompok tenaga kerja 15 – 19 orang sebanyak 22 usaha (0,65 persen), dan kelompok tenaga kerja 15 – 19 orang sebanyak 10 usaha (0,29 persen).

Gambar 1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Menurut Jenis Industri Mikro/Kecil Triwulan I Tahun 2012

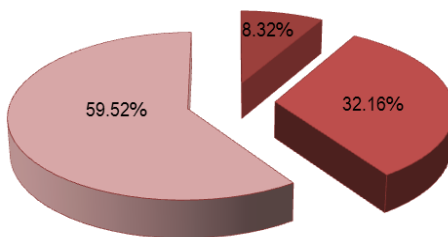


Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha UMK umumnya 21-31 hari kerja dalam sebulan, yaitu sebanyak 59,52 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 8 (delapan) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 11-20 hari sebanyak 32,16 persen, dan selebihnya sebanyak 8,32 persen hanya bekerja dalam sebulan antara 1-10 hari.

Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil
Tabel 1 Menurut Kelompok Tenaga Kerja
Triwulan I Tahun 2012

Kelompok Tenaga Kerja	Provinsi Papua	Indonesia
	(1)	(3)
1	905	1.104.339
2 – 4	2.208	1.709.098
5 – 9	269	262.779
10 – 14	22	116.833
15 – 19	10	25.000
Jumlah	3.414	3.218.049

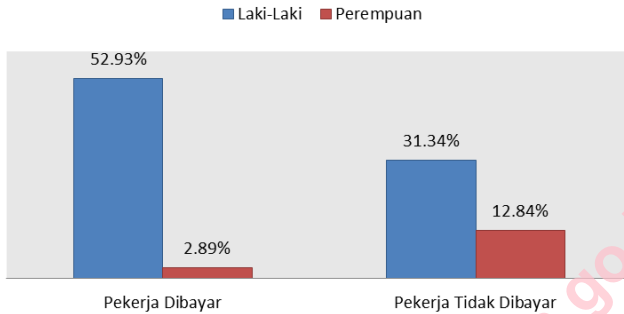
Gambar 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Triwulan I Tahun 2012



- 1-10 hari kerja dalam sebulan, dengan rata-rata 6 jam kerja per hari
- 11-20 hari kerja dalam sebulan, dengan rata-rata 6 jam kerja per hari
- 21-31 hari kerja dalam sebulan, dengan rata-rata 8 jam kerja per hari

B. TENAGA KERJA

Gambar 3. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin

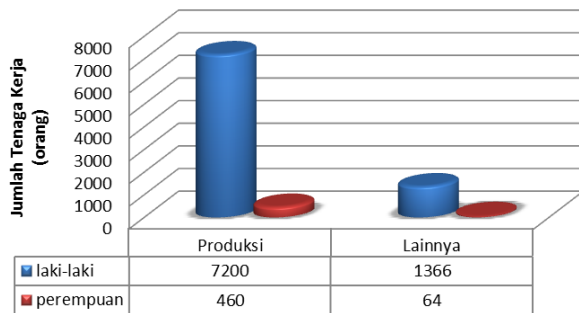


Perusahaan/usaha IMK di Provinsi Papua pada triwulan I Tahun 2012 ini, terdiri dari pekerja dibayar sebanyak 55,82 persen (52,93 persen pekerja laki-laki dan 2,89 persen

pekerja perempuan) dan 44,18 persen pekerja tidak dibayar (31,34 persen pekerja laki-laki dan 12,84 persen pekerja perempuan). Banyaknya tenaga kerja tidak dibayar ini cukup tinggi kemungkinan karena sebagian besar usaha adalah industri mikro, sehingga banyak menggunakan pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar.

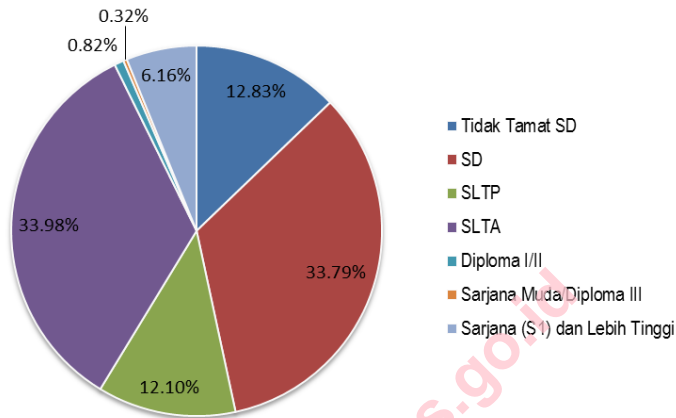
Sebaran banyaknya tenaga kerja menurut jenis tenaga kerja, terdiri dari pekerja produksi sebanyak 8.566 orang (84,05 persen pekerja laki-laki dan 15,95 persen pekerja perempuan)

Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Tenaga Kerja dan Jenis Kelamin



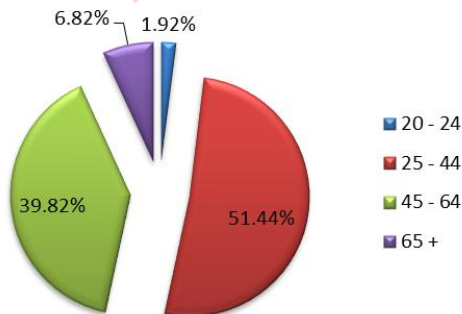
dan pekerja lainnya sebanyak 524 orang (87,79 persen pekerja laki-laki dan 12,21 persen pekerja perempuan). Pekerja produksi lebih banyak pekerja laki-laki kemungkinan karena pekerjaannya lebih membutuhkan tenaga fisik dan ketrampilan yang memadai.

Gambar 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Triwulan I Tahun 2012



Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengusaha IMK sebagian besar adalah lulusan SLTA (33,98%) dan SD (33,79%). Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus tertentu.

Gambar 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Umur Pengusaha Triwulan I Tahun 2012

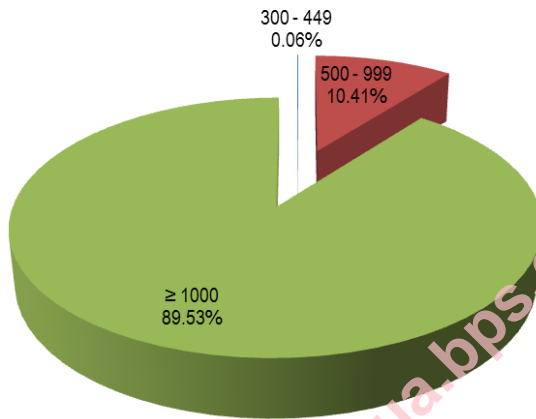


Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha IMK di Papua sebagian besar berada di usia produktif.

Sedangkan jika dilihat dari umur pengusaha, pengusaha IMK sebagian besar tergolong pada kelompok umur 25 – 44 tahun sebesar 51,82 persen dan kelompok umur 45 – 64 tahun sebesar 39,82 persen. Tidak ada pengusaha IMK yang berumur dibawah 20

C. BALAS JASA PEKERJA

Gambar 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besarnya Balas Jasa Pekerja Dibayar Per Bulan (000 Rp) Triwulan I Tahun 2012



Sebagian besar (89,53 persen) balas jasa yang diterima per pekerja dibayar di Provinsi Papua yaitu satu juta atau lebih per bulan. Sisanya balas jasa pekerja dibayar berada pada kisaran Rp 500 ribu s/d Rp 999 ribu yaitu

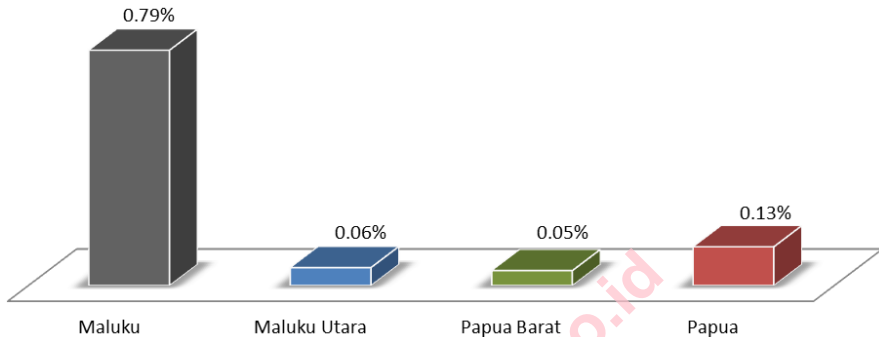
sebesar 10,41 persen dan Rp 300 ribu s/d Rp 449 ribu yaitu sebesar 0,06 persen.

Cukup besarnya balas jasa pekerja dibayar per bulan ini menunjukkan bahwa balas jasa pekerja pada usaha IMK di Provinsi Papua sudah cukup baik, karena mendekati rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) Papua.

D. PENGELUARAN

Dalam menjalankan usaha, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku dan penolong, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, sewa alat-alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta jasa lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja).

Gambar 8. Persentase Pengeluaran Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Terhadap Pengeluaran Usaha di Indonesia Menurut Besarnya Triwulan I Tahun 2012



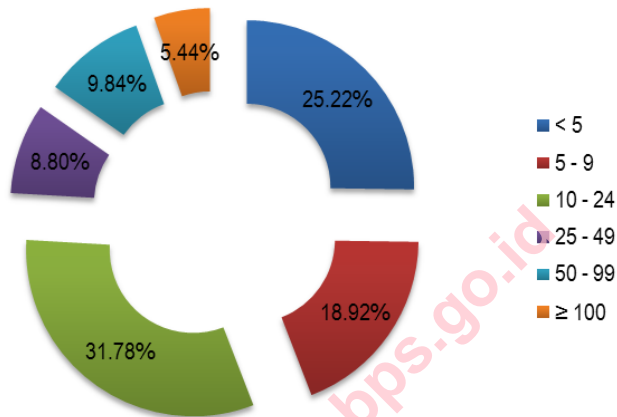
Dari sekitar 3.414 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada triwulan I tahun 2012, pengeluaran usaha sebesar 0,13 persen dari pengeluaran usaha di Indonesia, salah satunya yaitu balas jasa pekerja sebesar 0,28 persen dari total balas jasa usaha di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran usaha di beberapa wilayah Indonesia Timur terhadap pengeluaran usaha di Indonesia, pengeluaran usaha di Provinsi Papua masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku. Akan tetapi lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

E. PENDAPATAN

Dari 3.414 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada triwulan I tahun 2012, pendapatan usaha IMK triwulan I tahun 2012 sebesar 0,18 persen dari total pendapatan usaha IMK triwulan I 2012 di Indonesia. Meskipun pendapatan usaha IMK kecil, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian Papua.

Gambar 9. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan Per Triwulan (Jutaan Rp) Triwulan I Tahun 2012

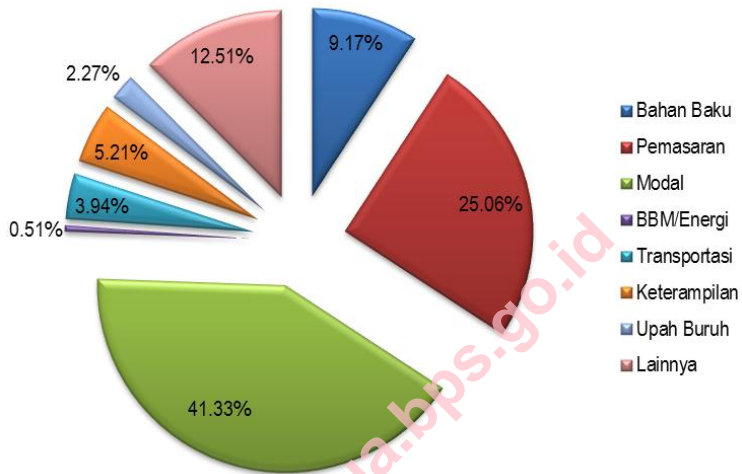


Besaran pendapatan per triwulan terbesar pada kisaran 10 s/d 24 juta Rupiah yaitu sebesar 33,61 persen dan besaran pendapatan per triwulan terendah pada kisaran 100 juta Rupiah atau lebih yaitu sebesar 5,44 persen dari total pendapatan usaha IMK per triwulan.

F. KENDALA USAHA

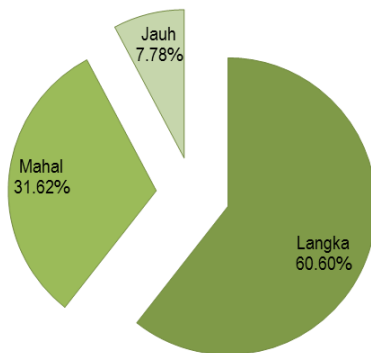
Sebagian besar usaha IMK (63,24 persen) mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sisanya merasa tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Kesulitan usaha IMK di Provinsi Papua bermacam-macam, seperti dalam hal pengadaan bahan baku, kesulitan pemasaran, kesulitan permodalan, kesulitan masalah BBM/Energi, kesulitan masalah transportasi, kesulitan masalah terbatasnya ketrampilan pekerja, kesulitan masalah upah buruh, dan lain-lain.

Gambar 10. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Utama Triwulan I Tahun 2012



Jenis kesulitan utama usaha IMK di Provinsi Papua yaitu kesulitan dalam permodalan 41,33 persen dan kesulitan pemasaran 25,06 persen. Kesulitan lainnya seperti masalah cuaca, dan sebagainya sebesar 12,51 persen dan kesulitan pengadaan bahan baku sebesar 9,17 persen.

Gambar 11. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku Triwulan I Tahun 2012

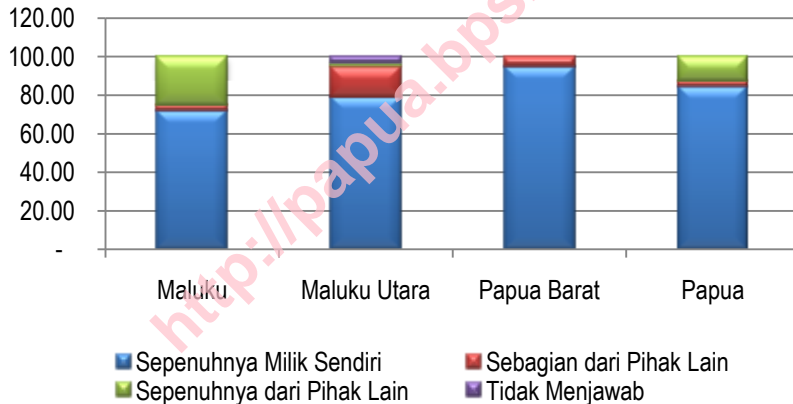


Kesulitan bahan baku yang cukup mempengaruhi kelancaran produksi pada usaha IMK umumnya disebabkan karena lokasi bahan baku yang langka (60,61%), bahan baku mahal (31,62%), dan lokasi bahan baku yang jauh (7,78%).

G. MODAL

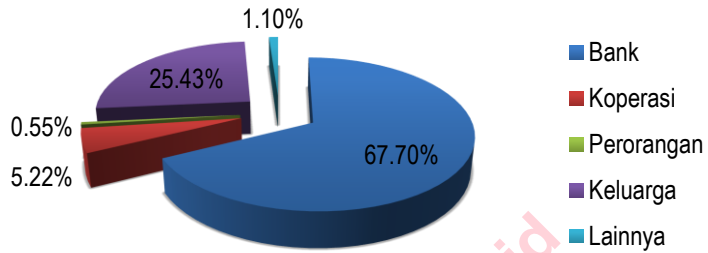
Sumber modal usaha IMK pada umumnya merupakan sepenuhnya milik sendiri, yaitu sebesar 83,99 persen, sedangkan usaha dengan modal sepenuhnya dari pihak lain sebesar 13,05 persen dan sebagian dari pihak lain sebesar 2,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK yang sudah cukup mandiri karena sebagian besar modal merupakan milik sendiri, sama seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur.

Gambar 12. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Sumber Modal Triwulan I Tahun 2012



Dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Provinsi Papua yang seluruh atau sebagian modal usahanya berasal dari pihak lain, 83,99 persen tidak memanfaatkan pinjaman-pinjaman dari pihak lain. Untuk usaha-usaha yang memanfaatkan pinjaman dari pihak lain, sebagian besar usaha mendapatkan modal pinjaman dari bank (67,70%), pinjaman keluarga (25,43%), dan sisanya pinjaman-pinjaman dari koperasi, perorangan dan lainnya.

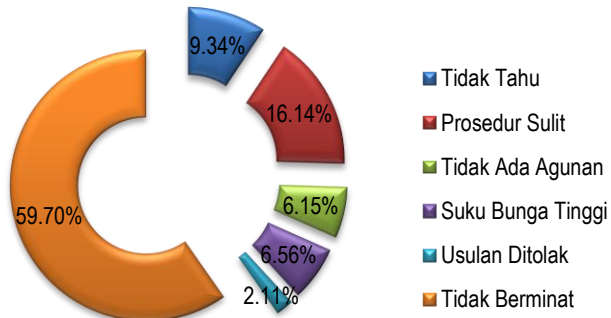
Gambar 13. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Asal Pinjaman Utama Triwulan I Tahun 2012



H. PERBANKAN

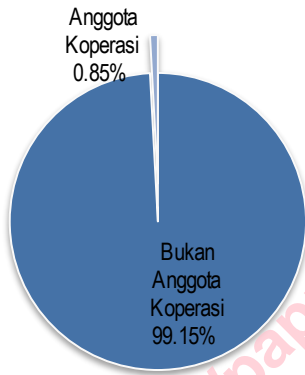
Walaupun asal pinjaman utama untuk modal usaha berasal dari bank, tetapi hanya 10,84 persen usaha IMK meminjam di bank. Sisanya tidak meminjam di bank lebih karena ketidaktertarikan usaha IMK untuk meminjam di bank, dengan alasan utama umumnya tidak berminat (59,70%), prosedur sulit (16,14%), dan sebagainya.

Gambar 14. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Triwulan I Tahun 2012



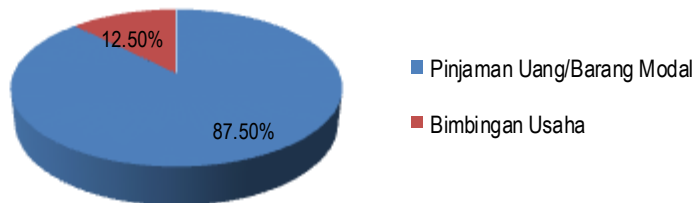
I. KOPERASI

Gambar 15.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi Triwulan I Tahun 2012



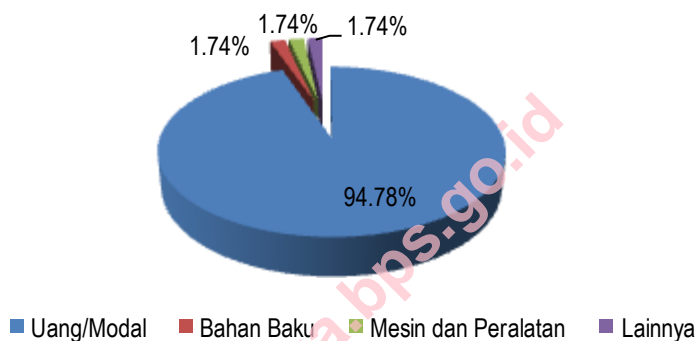
Manfaat Koperasi pada usaha IMK ternyata belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Tercatat dari hasil VIMK12 triwulan I, hanya 0,85 persen saja pengusaha yang menjadi anggota Koperasi. Sisanya sekitar 99,15 persen tidak menerima pelayanan Koperasi. Dari pengusaha yang menerima pelayanan Koperasi, sebagian besar (87,50 persen) memanfaatkan pinjaman uang/barang modal. Sisanya menerima pelayanan koperasi berupa bimbingan usaha.

Gambar 16.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Pelayanan Koperasi yang Diterima Triwulan I Tahun 2012



J. NON-KOPERASI

Gambar 17.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Bantuan Non-Koperasi yang Diterima Triwulan I Tahun 2012

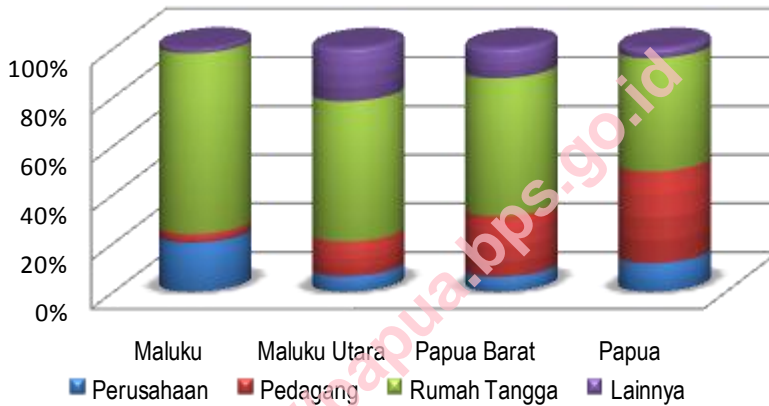


Bantuan non-koperasi disini antara lain seperti bantuan dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, dan sebagainya. Bantuan dapat berupa bantuan uang, bahan baku, pemasaran, bimbingan/pelatihan/penyuluhan, mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya.

Sebagian besar (98,32%) usaha IMK tidak menerima bantuan dari Non-Koperasi. Sisanya menerima bantuan dari Non-Koperasi, sebagian besar usaha IMK menerima bantuan uang/modal (94,78%). Selain itu, ada juga usaha IMK yang menerima bantuan berupa bahan baku, mesin dan peralatan, dan bantuan lainnya masing-masing sekitar 1,74 persen.

K. PEMASARAN

Gambar 18.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Perusahaan Triwulan I Tahun 2012



Pemasaran hasil produksi perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mempromosikan hasil produksinya. Pemasaran hasil produksi perusahaan IMK di Provinsi Papua sebagian besar masih digunakan oleh rumah tangga, yaitu sebesar 46,57 persen, sama seperti seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur.

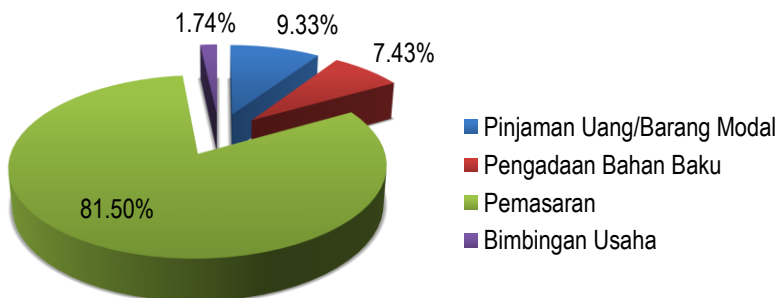
Sisanya digunakan oleh pedagang, perusahaan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar barang hasil produksi IMK merupakan barang yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan barang yang digunakan oleh pedagang atau perusahaan biasanya untuk dijual atau diproses lagi.

L. KEMITRAAN

Kemitraan usaha dapat dilakukan dengan badan/lembaga lain seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, maupun lainnya, baik ada *memorandum of understanding* (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan atau tidak. Kemitraan dapat berupa bantuan uang, pengadaan bahan baku, pemasaran, bimbingan/pelatihan/penyuluhan, mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya.

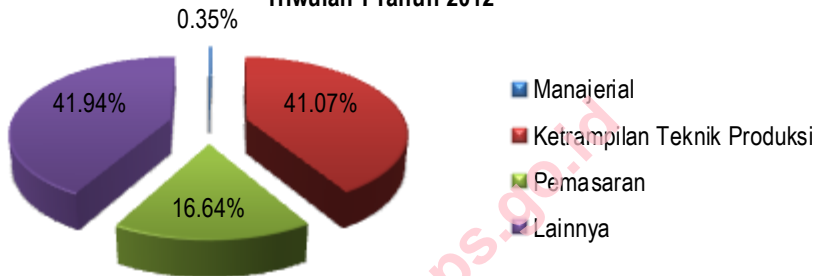
Tercatat dari hasil VIMK12 Triwulan I, sekitar 32,44 persen usaha tidak menjalin kemitraan. Dari 17,56 persen usaha yang menjalin kemitraan, 65,66 persen menjalin kemitraan pemasaran, sebanyak 19,53 persen dari usaha yang menjalin kemitraan pengadaan bahan baku, sebanyak 12,39 persen usaha menjalin kemitraan uang/barang modal, dan hanya 2,42 persen usaha menjalin kemitraan bimbingan usaha.

Gambar 19.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain Menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Triwulan I Tahun 2012



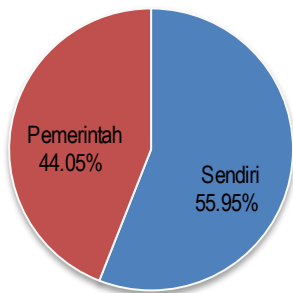
M. BIMBINGAN USAHA

Gambar 20.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya Pernah Mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Jenis Bimbingan Usaha Triwulan I Tahun 2012



Kebanyakan usaha IMK (92,98 persen) tidak pernah mengikuti bimbingan usaha, sisanya sebanyak 7,02 persen pernah mengikuti bimbingan usaha. Jenis bimbingan usaha terbanyak yang diperoleh yaitu ketrampilan teknik produksi dan lainnya masing-masing sekitar 41,07 persen dan 41,94 persen. Ada juga usaha IMK yang mengikuti bimbingan pemasaran sebesar 16,64 persen dan bimbingan manajerial sebesar 0,35 persen.

Gambar 21.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya pernah mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Penyelenggara Bimbingan Usaha Triwulan I Tahun 2012



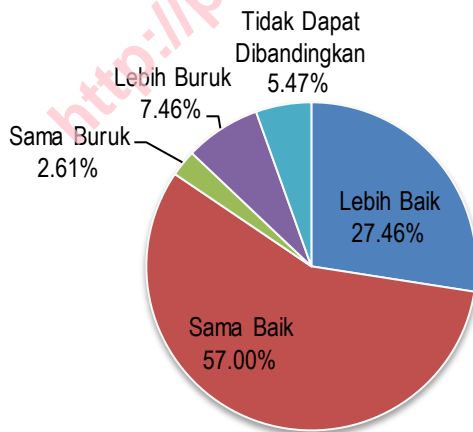
Penyelenggara bimbingan usaha sebagian besar atas inisiatif perusahaan/usaha IMK sendiri, yaitu sebesar 55,95 persen. Selain itu, ada juga penyelenggara bimbingan usaha dari instansi pemerintah sebesar 44,05 persen.

N. PROSPEK USAHA

Kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih sepenuhnya dari krisis ditandai oleh belum berubahnya iklim usaha secara umum. Kebanyakan pengusaha IMK di Provinsi Papua merasakan kondisi usaha triwulan I Tahun 2012 sama baik dibandingkan keadaan pada triwulan sebelumnya, yaitu sekitar 57 persen.

Ada juga pengusaha IMK yang merasakan kondisi usahanya lebih baik, yaitu sekitar 27,46 persen. Sisanya ada pengusaha IMK yang merasakan kondisi usahanya lebih buruk, sama buruk, dan tidak dapat dibandingkan.

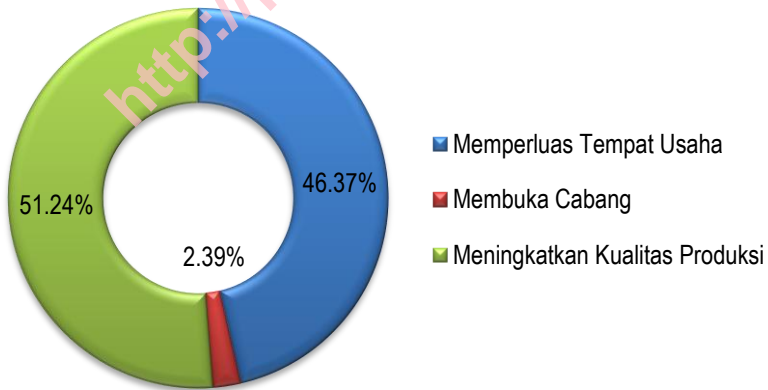
Gambar 22.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keadaan Usaha Triwulan I Tahun 2012 Dibanding Triwulan Sebelumnya



Sekitar 69,20 persen pengusaha IMK di Provinsi Papua mempunyai tidak mempunyai rencana untuk mengembangkan atau memperluas usaha pada tiga bulan (triwulan) yang akan datang. Sisanya (30,80%) pengusaha IMK mempunyai rencana untuk mengembangkan atau memperluas usaha pada tiga bulan (triwulan) yang akan datang.

Rencana untuk mengembangkan atau memperluas usaha tersebut sebagian besar (51,24%) dengan cara meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, adanya rencana pengusaha untuk memperluas tempat usaha, yaitu sekitar 46,37 persen. Sisanya ada yang memiliki rencana untuk membuka cabang sebesar 2,39 persen dari usaha IMK di Provinsi Papua.

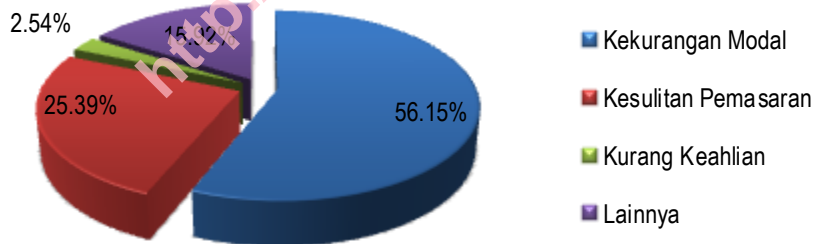
Gambar 23.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Rencana Mengembangkan/Memperluas Usaha Pada Triwulan Selanjutnya Tahun 2012



Tidak adanya rencana untuk mengembangkan atau memperluas usaha ini sebagian besar disebabkan karena kekurangan modal sebesar 56,15 persen, disusul karena kesulitan pemasaran, kurang keahlian, dan lainnya masing-masing sebesar 25,39 persen, 2,54 persen, dan 15,92 persen.

Kesulitan-kesulitan tersebut kemungkinan disebabkan karena bantuan-bantuan usaha, baik dari koperasi, non-koperasi, maupun CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang mengharuskan dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, termasuk untuk bantuan usaha, belum menyentuh usaha IMK di Provinsi Papua.

Gambar 24.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Ada Rencana Untuk Mengembangkan/Memperluas Usaha Pada Triwulan Selanjutnya Tahun 2012



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papua.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

Gedung Pelni Lt. 3 Jalan Argapura No : 15

Telepon : 0967-534519, 533028 (Hunting), Fax. 536490

Email : bps9400@bps.go.id. Homepage : papua.bps.go.id